

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan kelompok atau sekelompok individu yang berkumpul untuk mencapai suatu tujuan yang ingin diraih bersama. Setiap organisasi punya misi berbeda, tergantung pada jenis organisasinya (Zemira, 2022). Perkembangan organisasi saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari pembagian kategori organisasi menjadi organisasi yang berfokus pada laba dan tidak berorientasi pada keuntungannya. Perbedaan utama antara kedua jenis organisasi tersebut berbeda berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi yang berorientasi pada keuntungan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan demi meningkatkan kesejahteraan pemilik dan pemegang sahamnya, kemudian organisasi non- laba mempunyai misi menaikkan level kesejahteraan organisasi atau pihak- pihak yang terlibat dalam karakteristik organisasi non- laba tanpa fokus perolehan keuntungan.

Dalam ISAK 35 diuraikan bahwasannya organisasi non-laba ISAK 35 menjelaskan organisasi non-laba (nirlaba) adalah organisasi yang tidak berorientasi dalam menggali untung atau laba, tapi fokusnya pada pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial dalam menghasilkan laba. Organisasi yang fokus pada tujuan tujuan sosial memperoleh pendapatan secara langsung yang lebih sering disebut sebagai donatur. Meskipun demikian, organisasi nirlaba lebih menekankan terhadap

penguatan sumber daya manusia itu sendiri sebagai aset paling utama. Dengan kompetensi sumber daya manusia yang memadai tentu bisa menciptakan seluruh kegiatan operasional nirlaba berlandaskan dari, oleh dan untuk manusia. Selain itu, terdapat ciri- ciri dari organisasi nirlaba untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Organisasi nirlaba pada umumnya mendapatkan pendanaan oleh donatur atau pemberi, di mana pemihak pemberi tidak menuntut adanya imbalan atas dana yang telah ditentukan (IAPI, 2020). Oleh karena itu, terdapat transaksi unik pada organisasi nirlaba yang jarang atau bahkan tidak dijumpai dalam organisasi berorientasi laba. Selain itu, kepemilikan organisasi nirlaba tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan sebagaimana yang berlaku pada perusahaan bisnis dan kepemilikan tercatat tidak menggambarkan sebuah keseimbangan pada saat perolehan pendapatan substansi pada masa likuiditas dan pembubaran (Salusu, 2010)

Menurut Andriani, dkk (2019; 3) bahwasannya organisasi nirlaba di Indonesia telah memperoleh pengakuan dari pemerintah melalui regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut mengelompokkan organisasi nirlaba ke dalam tiga bentuk utama, yakni yayasan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pengelola zakat. Organisasi nirlaba bekerja di berbagai macam sektor, seperti kesehatan, pelayanan sosial, pendidikan, dan konservasi lingkungan. Kelompok nirlaba di sektor pendidikan mendukung inisiatif pemerintah untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, karena fasilitas yang disediakan pemerintah belum cukup besar untuk menampung seluruh anak usia

sekolah. Lembaga pendidikan merupakan bagian dari organisasi nirlaba karena selain sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai pengatur kebutuhan masyarakat dan agen sosialisasi lebih lanjut setelah lembaga keluarga, juga didirikan tidak untuk mengejar keuntungan (Zakiah, 2022). Salah satu organisasi berorientasi nirlaba dalam lembaga pendidikan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan ialah sebuah wujud organisasi nirlaba dimana mendapatkan legitimasi hukum dari pemerintah.

Yayasan merupakan badan hukum yang memisahkan kekayaan institusi baik kekayaan pribadi pendiri, dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan dalam berbagai bidang, khususnya sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, serta tidak memiliki anggota dalam struktur organisasinya (Dewi, 2022). Yayasan dianggap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat karena secara tradisional dipahami bukan sebagai lembaga yang berorientasi laba, melainkan berdiri diatas dasar kepedulian dan inisiatif para pendiri serta pengurusnya untuk menjawab kebutuhan sosial.

Yayasan yang geraknya di sektor pendidikan atau yayasan sekolah adalah lembaga nirlaba yang mengalokasikan sumber daya untuk mendirikan dan mengelola satuan pendidikan, dengan orientasi pada pelayanan masyarakat melalui penyediaan akses pendidikan kepada konsumen jasa pendidikan, meliputi anak didik, siswa, mahasiswa, santri, maupun masyarakat luas sebagai *stakeholders*. Dengan demikian, penyelenggaraan layanan pendidikan diharapkan dapat memenuhi harapan serta memberikan kepuasan bagi para *stakeholders* yang terkait. Penggunaan dana pada yayasan wajib dilaksanakan

dengan optimal supaya bisa menyongkong peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan di sekolah. Sebagaimana organisasi laba, organisasi nirlaba pun perlu sebuah akuntansi sebagai tata guna menuliskan transaksi keuangan, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Walaupun memperoleh keuntungan bukan sasaran pokok, mayoritas lembaga non-profit tetap menyusun laporan finansial sebagai wujud akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Maulana & Rahmat, 2021). Organisasi nirlaba memberikan suatu bentuk pelaporan atau informasi secara akuntabilitas dan transparan dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat, yayasan berkewajiban membuat dan menyajikan laporan keuangannya selaras dengan ketentuan serta standar akuntansi yang sah.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pada organisasi nirlaba, Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan ISAK 35 terkait Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba. Regulasi ini mulai diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2020 setelah disahkan pada 11 April 2019. Di dalamnya ditegaskan bahwasannya setiap entitas wajib menyusun lima bentuk laporan keuangan sesuai karakteristiknya, yakni laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, arus kas, perubahan aset neto, serta catatan atas laporan keuangan (Nurfaisyah, 2021). Implementasi standar ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi entitas nirlaba dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas serta keterandalan informasi dapat terjaga, sekaligus memastikan laporan tersebut dapat disajikan kepada para pemakai laporan keuangan secara tepat.

Penerapan ISAK 35 pada lembaga atau yayasan nirlaba menunjukkan tren peningkatan kesadaran akan pentingnya standar akuntansi yang spesifik untuk lembaga nirlaba. Hal ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel, tetapi juga menunjukkan kebutuhan lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk donatur, pemerintah, dan masyarakat luas. Secara empiris, semakin banyak yayasan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, dan pendidikan di Indonesia yang mulai mengadopsi ISAK 35 dan sebagian besar yayasan telah berhasil menyusun laporan yang memenuhi aspek-aspek pokok dalam ISAK 35,

Dengan demikian, penerapan ISAK 35 ini tidak semata-mata merupakan tindak lanjut regulasi, tetapi juga bagian dari evolusi praktik tata kelola organisasi yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan dan kinerja institusional. Implementasi ISAK 35 pada lembaga nirlaba di Indonesia pada akhirnya dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan sektor nirlaba yang lebih profesional dan kredibel dalam jangka panjang.

Bagi sebuah Yayasan, penyusunan laporan keuangan memegang peranan yang krusial karena memberikan gambaran mengenai sumber penerimaan, baik yang berasal dari donasi, wakaf, maupun hibah, sekaligus mencatat kepemilikan aset. Setiap aktivitas yang melibatkan transaksi finansial wajib dibukukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana,

sehingga pihak- pihak yang membutuhkan dapat memperoleh informasi tersebut secara jelas.

Dalam pengelolaan keuangannya, SD Muhammadiyah 13 Surabaya menerapkan praktik pelaporan yang selama ini umumnya masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang terstandar, sebatas mencatat kas masuk dan kas keluar yang terjadi selama periode tertentu. laporan keuangan yang dihasilkan umumnya hanya mencerminkan posisi kas tanpa menyajikan informasi yang lebih luas, seperti pencatatan aset tetap, beban penyusutan maupun rincian lainnya. Hal tersebut menjadikan laporan keuangan SD Muhammadiyah 13 Surabaya belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan sekolah kepada pemangku kepentingan, seperti pihak yayasan, kepala sekolah serta pihak pihak lain yang membutuhkannya.

Sebagai bagian pentingnya organisasi nirlaba, SD Muhammadiyah 13 Surabaya memerlukan penyusunan laporan keuangan selaras standarisasi akuntansi yang berlaku. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kepercayaan publik sekaligus meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pada yayasan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dengan prosedur yang semestinya diterapkan. Berdasar pada latar belakangnya, peneliti bermaksud menjalankan penelitian berjudul “Penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 di SD Muhammadiyah 13 Surabaya”

## B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang, penulis bisa menyimpulkan dari permasalahan terkait laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Semua organisasi yang menghasilkan laba maupun nirlaba perlu memerlukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik dan benar untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan sehingga memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas yang berguna bagi pengambilan keputusan, evaluasi kinerja dan pertanggung jawaban bagi pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “ Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 di SD Muhammadiyah 13 Surabaya?”

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yakni sebuah panduan yang ingin dipakai peneliti saat menjalankan penelitiannya, sehingga sasaran dan target harus dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan konteks dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 di SD Muhammadiyah 13 Surabaya.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian, maka manfaat yang didinginkan dari penelitian ini :

1. Bagi pihak sekolah, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Pada langkah

berikutnya, diharapkan laporan keuangan dapat menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dalam waktu yang panjang, pengelolaan keuangan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan.

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian ini mampu memberi manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, khususnya dalam memahami bahwasanya penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 memiliki peran penting bagi organisasi nirlaba.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi riset dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik sejenis.

